VOL. 01 NO. 03 - AGUSTUS 2021
E-ISSN 2797 006X
KRIDA CENDEKIA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT BAYAN

Ni Made Suindari[1], I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi[2], A.A Putu Agung Mirah Purnama Sari[3]

[1,2,3)] Universitas Warmadewa
Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar-Bali 80235
*Email: madesuindari87@gmail.com

ABSTRAK

Pendirian LPD di Bali diawali pada tahun 1983 dan sampai saat ini Lembaga Perkreditan Desa atau yang dikenal sekarang sebagai Lembaga *Labda Pacingkreman Desa* memiliki visi dan misi yang berkaitan erat dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu *parhyangan, pawongan,* dan *palemahan*. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bayan didirikan berdasarkaan SK. Gubernur Nomor: 433/01-C/HK/2003, merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat Bayan. Melihat latar belakang pendidikan, pengurus LPD mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya disebabkan belum memiliki pengetahuan memadai mengenai pencatatan pembukuan (akuntansi) serta belum cakap mengoperasionalkan komputer. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan serta memberikan pelatihan penggunaan komputer untuk menyusun laporan keuangan.

Kata Kunci: Pelatihan, Pendampingan, Laporan Keuangan, LPD

PENDAHULUAN

Jenis-jenis lembaga tradisional dalam masyarakat Bali adalah desa, *banjar, subak* dan *sekehe*. Bentuk lembaga tradisional atas dasar kesatuan wilayah disebut desa, konsep desa memiliki pengertian yaitu desa adat dan desa dinas (Saputra dkk., 2019). Desa adat adalah kesatuan masyarakat hubungan adat di daerah Bali yang memiliki kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Efferin, 2015). Landasan dasar dari desa adat di bali adalah konsep *Tri Hita Karana*. Dengan mengadopsi konsep *sekaa*, *banjar* dan desa adat yang telah tumbuh sejak lama di dalam masyarakat Bali, pada tahun 1983 Gubernur Provinsi Bali pada masa tersebut yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra merumuskan gagasan untuk membentuk sebuah lembaga keuangan berbasis adat dengan meluncurkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) atau yang dikenal sekarang sebagai Lembaga *Labda Pacingkreman Desa* (Juniariani & Saputra, 2020). Tujuan LPD yakni membantu desa adat dan *krama* desa adat dalam pembangunan adat, budaya dan agama (Saputra dkk., 2019). Perkembangan pengaturan/peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984.
2. Diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa

3. Diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
4. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
5. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
6. Perubahan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Perkembangan perubahan ataupun penggantian Perda tentang LPD menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mewujudkan komitmen politik yang kuat untuk tetap melindungi, mendukung dan memberikan pelayanan penguatan LPD sesuai dengan perkembangan situasi, namun tetap memiliki karakteristik yang sesuai untuk mendukung pembangunan *Desa Pakraman* dalam arti luas (Adiputra *et al*., 2014; Saputra *et al*., 2019). Pada Perda LPD yang terbaru, terdapat perubahan mengenai pengertian LPD. LPD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 memiliki pengertian bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik desa *pakraman* (Atmadja & Saputra, 2014; Saputra, Sujana, et al., 2018). Penegasan LPD sebagai *duwe* (milik) desa *pakraman* juga dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang timbul antara LPD dengan desa *pakraman* di Bali yang tidak ada di desa lain di Indonesia (Suardikha, 2013).

LPD mempunyai visi dan misi yang berkaitan erat dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan *(parhyangan),* mengharmoniskan hubungan manusia dengan manusia *(pawongan)* (Jayawarsa *et al*., 2020; Kamayanti, 2015), dan mengharmoniskan hubungan manusia dengan lingkungan *(palemahan)*. Berbeda dengan BPR yang berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas, melakukan kegiatan keuangan dengan tujuan mendapatkan profit/keuntungan demi kepentingan pemegang saham/pemodal, keuntungan LPD direncanakan untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat Bali, baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik (Atmadja *et al*., 2019; Kurniawan, 2016; Saputra, 2012). LPD sebagai lembaga keuangan milik desa *pakraman* memiliki motif untuk mensejahterakan *kramadesa* atau masyarakat desa yang ada disuatu daerah desa *pakraman*. Sebagai lembaga keuangan desa, LPD juga memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat desa *pakraman* dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. LPD juga memerlukan pengelolaan yang baik oleh *prajuru* LPD atau pengurus dan badan pengawas. Perkembangan sebuah LPD bergantung pada SDM pengurusnya (Juniariani & Saputra, 2020; Saputra, Trisnadewi, dkk., 2019; Suardikha, 2013).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bayan didirikan berdasarkaan SK. Gubernur Nomor: 433/01-C/HK/2003, merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat Bayan. LPD Desa Adat Bayan berlokasi di Jalan Raya Marga-Apuan, Banjar Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Potensi Desa Adat Bayan terdiri dari 1 (satu) banjar adat dengan jumlah penduduk asli sebanyak 450 Jiwa (122 KK). Sumber daya manusia yang menjalankan operasional LPD Desa Adat Bayan terdiri dari 3 (tiga) orang *prajuru* (*pamucuk, panyarikan* dan *patengen*). Sampai saat ini, produk-jasa layanan LPD Desa Adat Bayan meliputi tabungan dan kredit (Atmadja & Saputra, 2017; Prafitri *et al*., 2018).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Bab X Pasal 18 disebutkan bahwa Parjuru LPD wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban keuangan dan melihat latar belakang pendidikan, pengurus LPD mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya. Pengurus belum memiliki pengetahuan memadai mengenai pencatatan pembukuan (akuntansi) serta belum cakap mengoperasionalkan komputer.

Gambar 1.1 LPD Desa Adat Bayan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus LPD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi:

1. SDM LPD belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara pembukuan
2. SDM belum cakap mengoperasionalkan komputer
3. Sarana pendukung operasional masih minim, dalam hal ini belum memiliki alat penyimpanan kas (brankas) yang mengakibatkan keamanan kas mitra belum memadai.

Dari permasalahan diatas, maka solusi penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah:

1. Memberikan pelatihan dan diikuti pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Memberikan pelatihan mengoperasionalkan komputer untuk laporan keuangan.
3. Memberikan alat penyimpanan uang (brankas) untuk menjaga keamanan kas mitra.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui pemberdayaan SDM LPD Desa Adat Bayan dengan tujuan mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan operasonal. Kegiatan yang dilakukan yakni:

1. Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini diawali dengan menggali pemahaman mitra berkaitan dengan pembukuan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi dan pemahaman secara umum mengenai proses akuntansi, laporan keuangan, beserta dokumen pendukungnya (Lestari *et al*., 2017; Spenkuch, 2017). Selanjutnya, mitra dituntun memahami pelaporan keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan untuk LPD. Mitra diberikan penjelasan tiap-tiap unsur laporan keuangan seperti neraca yang menunjukkan jumlah asset, kewajiban

serta modal yang dimiliki, laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja LPD dalam satu periode (Istiqomah, 2018; Riswan & Kesuma, 2014). Mitra juga diberikan penjelasan tata cara menyusun dokumen pendukung seperti jurnal, buku besar, daftar nominatif kredit dan simpanan untuk mengetahui nasabah, jumlah kredit yang disalurkan, jumlah dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan, serta rincian aset tetap yang dimiliki. Setelah memberikan pemahaman, mitra dilatih membuat jurnal, buku besar, daftar nominatif, dan laporan keuangan sesuai dengan data yang tersedia pada mitra (Frasti dkk., 2017).

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mitra tentang pembukuan/pelaporan keuangan (Murti dkk., 2018). Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh tim pengusul (ketua pengusul). Mitra dibimbing dan didampingin untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas serta pengeluaran kas terkait operasional, membuat jurnal, buku besar, laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya. Melalui pelatihan yang diikuti pendampingan harapannya mitra mampu mandiri untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan.

2. Pelatihan Pengoperasian Komputer

Mitra belum cakap mengoperasikan komputer. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan dan lingkungan wilayah mitra yang sebagian besar bekerja disektor pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengusul (anggota) memberikan pelatihan untuk mengoperasikan komputer (program *excel* dan *word*) untuk membantu menyusun laporan keuangan (Pamungkas, 2018). Melalui pelatihan ini diharapkan mitra dapat menyusun laporan keuangan dengan waktu lebih efisien dan memiliki data yang disimpan dalam bentuk *softcopy*.

3. Pengadaan Peralatan Alat Penyimpanan Kas

Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa dalam menjalankan operasionalnya, mitra memiliki alat penyimpanan kas berupa brankas yang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan keamanan kas belum memadai, mengingat kondisi fisik kas yang sifatnya mudah dipindahtangankan dan disalahgunakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tim pengusul (ketua dan anggota) membantu dalam penggadaan peralatan penyimpanan kas berupa brankas.

HASIL

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Pembuatan Buku Kas dan Laporan Harian Kas

Buku kas diperlukan bagi mitra sebagai informasi aliran kas masuk dan kas keluar terkait operasional setiap harinya (Murti dkk., 2018). Catatan ini digunakan untuk mengontrol jumlah kas yang ada dicatatan dengan fisiknya. Apabila jumlah kas telah sama antara catatan dengan fisik, artinya segala transaksi pengeluaran dan pemasukan kas telah dicatat (Riswan & Kesuma, 2014). Selanjutnya dibuat laporan harian kas per tanggal operasional yang merinci nominal fisik uang beserta jumlah lembarnya. Setelah dilakukan pelatihan secara tatap muka dengan prosedur kesehatan, mitra telah mampu membuat buku kas dan laporan harian kas.

2. Pembuatan Daftar Nominatif

Daftar nominatif kredit dan simpanan dibuat untuk mengetahui nasabah, jumlah kredit yang disalurkan, jumlah dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan. Daftar nominatif kredit dibuat dalam beberapa kolom yang memuat informasi nama debitur, alamat, jumlah

kredit, jangka waktu dan saldo pinjaman (Dwiharyadi dkk., 2012; Saputra, Anggiriawan, dkk., 2018). Daftar nominatif tabungan juga dibuat dalam beberapa kolom yang memuat informasi nama nasabah, alamat, jumlah tabungan. Setelah dilakukan pelatihan secara tatap muka dengan prosedur kesehatan, mitra telah mampu membuat daftar nominatif kredit dan tabungan (Rachmawati, 2016).

3. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dimulai dari jurnal (catatan akuntansi yang pertama). Dari informasi buku kas, transaksi kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan berdasarkan kode akun. Masing-masing akun dikumpulkan menjadi satu dan dihitung saldo akhirnya dkk., 2019). Saldo akhir masing-masing akun disajikan sesuai klasifikasinya dalam laporan keuangan. Akun yang bersifat riil (akun riil) disajikan dalam neraca dan akun yang bersifat nominal (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Setelah dilakukan pelatihan secara tatap muka dengan prosedur kesehatan, mitra mulai mampu menyusun laporan keuangan (Umboh *et al*., 2018).

4. Pelatihan Menggunakan Komputer

Penyusunan laporan keuangan melalui komputer, diawali dengan pelatihan menginput data di dalam bentuk excel membuat daftar nominatif (kredit dan tabungan). Hasilnya, keterampilan mitra menggunakan komputer meningkat. Untuk menyusun laporan keuangan, tim pengabdi menyiapkan aplikasi excel (Mailoor dkk., 2003). Pelatihan menggunakan aplikasi ini masih memerlukan pendampingan yang sampai saat ini masih dilakukan. Perbandingan kemampuan mitra sebelum dan setelah kegiatan PKM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kemampuan Mitra

Keterangan	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
Pembuatan buku kas dan laporan harian kas	Buku kas dibuat seadanya (belum dirinci) dan belum membuat laporan harian kas	Buku kas dibuat lebih rinci, dan laporan harian kas dibuat dan ditandatangani pengurus
Pembuatan daftar nominatif	Daftar nominatif dibuat seadanya, informasi belum rinci	Daftar nominatif dibuat lebih rinci
Penyusunan laporan keuangan	Pembuatan laporan keuangan dibantu oleh pengawas LPD	Laporan keuangan disusun pengurus
Pelatihan menggunakan komputer	Belum fasih menginput data di komputer *(excel)*	Mulai fasih menginput data di komputer *(excel)*

5. Pengadaan sarana penyimpanan kas

Dalam menjalankan operasionalnya, mitra memiliki alat penyimpanan kas berupa brankas yang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan

keamanan kas belum memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdi melakukan pengadaan brankas yang diserahkan kepada mitra.

Dokumentasi kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan

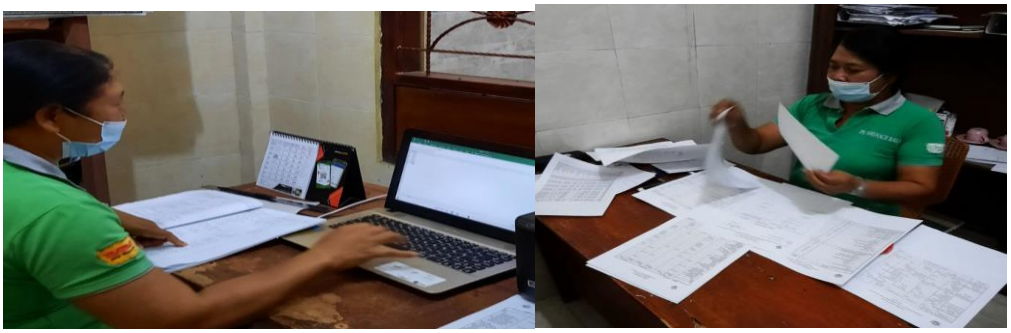

Dokumentasi penyerahan sarana penyimpana kas (brankas)

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I. M. P., Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2014). Culture of Tri Hita Karana as Moderating Effect of Locus of Control on the Performance of Internal Auditor (Studies in the Office of the Provincial Inspectorate in Bali). *Research Journal of Finance and Accounting*, *5*(22), 27–36.

Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2014). The Effect Of Emotional Spiritual Quotient (ESQ) To Ethical Behavior In Accounting Profession With Tri Hita Karana Culture's As A Moderating Variable. *Research Journal of Finance and Accounting*, *5*(7), 187–197.

Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *12*(1), 7–16.

Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2019). Proactive Fraud Audit , Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, *XXII*(3), 201–214.

Dwiharyadi, A., Fontanela, A., & Hatta, E. (2012). Analisis dan evaluasi penatausahaan akuntansi keuangan daerah menuju opini wajar tanpa pengecualian. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *7*(2), 36–45.

Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *6*(3), 466–480. https:// doi.org /10. 18202/jamal.2015.12.6037

Frasti, H. E., Dita, E. P., Pracinthea, E., Syahputra, A., Widyawati, A., & Hananto, S. T. (2017). Karakteristik Kepala Daerah Dan Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *21*(1), 21. https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.131

Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *3*(2), 69–90. https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66

Jayawarsa, A. A. K., Purnami, A. A. S., & Saputra, K. A. K. (2020). Budgetary slack: Participation perspective, information asymmetry, and local wisdom of Tri Hita Karana. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, *12*(1), 210–217. https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I1/20201031

Juniariani, N. M. R., & Saputra, K. A. K. (2020). Internal Locus of Control dan Efek Computer Anxiety pada Kinerja Karyawan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 45. https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.22668

Kamayanti, A. (2015). Sains Memasak Akuntansi: Pemikiran Udayana dan Tri Hita Karana. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, *1*(2), 73. https://doi.org/10.18382/jraam.v1i2.16

Kurniawan, P. S. (2016). Peran Adat Dan Tradisi dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). In *Seminar Nasional Riset Inovatif*.

Lestari, E. B., Tarjo, & Prasetyono. (2017). The Factors Affecting Tendency Of Fraud In Government Sector. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, *5*(2), 67–76.

Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2003). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan , Budaya Organisasi , Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah , Peran APIP , Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good*

Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). 17, 82–94.

Murti, A. K., Trisnadewi, A. A. E., Citraresmi, L. D., & Saputra, K. A. K. (2018). SAK ETAP, Kualitas Laporan Keuangan dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *6*(2), 52–61. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v6i2.16300

Pamungkas, B. (2018). Determinan penerapan basis akrual secara penuh pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, *22*(1), 68–85. https://doi.org/10.24912/ja.v22i1.323

Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(2), 87. https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291

Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D. R. (2018). The business management of the village government in managing Village Owned Enterprise. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, *31*(3), 328–338.

Rachmawati, R. (2016). Sistem Informasi Dilihat dari Aspek Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, *4*(2), 985–992.

Riswan, R., & Kesuma, Y. F. (2014). Analisis Laporan Keuangan sebagai dasar dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(1). https://doi.org/10.36448/jak.v5i1.449

Saputra, K. A. K. (2012). Pengaruh Locus of Control Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Internal Auditor Dengan Kultur Lokal Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *3*(1).

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, *3*(1), 306–321.

Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. A. K., & Atmadja, A. T. (2019). Resurrection as a fading implication of accountability in financial management for village credit institution. *International Journal of Business, Economics and Law*, *19*(5), 258–268.

Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, *1*(1), 28–41.

Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *4*(1), 1–23. https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250

Spenkuch, J. L. (2017). Religion and work: Micro evidence from contemporary Germany. *Journal of Economic Behavior and Organization*, *135*, 193–214. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.01.011

Suardikha, I. M. S. (2013). Pengaruh Budaya Tri Hita Karana Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dimediasi Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *10*(1), 102–128. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.06

Umboh, Y., Worang, F. G., Tumewu, F. J., & Tasik, H. H. D. (2018). Analyzing The Difference Of E-Banking Services Between Bank Central Asia And Bank Mandiri In Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *6*(1), 71–80. https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.18763